

SANKSI PIDANA DENDA EMAS DAN HUKUMAN CAMBUK DALAM QANUN ACEH

Sopiani

Abstrak

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang ditetapkan tanggal 22 Oktober 2014 dan diundangkan tanggal 23 Oktober 2014, mengatur sanksi pidana denda emas dan hukuman cambuk menurut penulis tidak mendasarkan penyusunan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena terdapat perbedaan pengaturan, selain itu dalam pengimplementasinya menuai pro dan kontra di masyarakat. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan ketentuan pidana peraturan daerah/qanun berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dapat mengatur ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Penelitian ini bertujuan melakukan pendalaman dan penganalisaan terhadap pidana denda emas dan hukuman cambuk dalam Qanun Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Dengan demikian Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat pengaturan besaran dan batasan sanksi pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atasnya dan bagi pembentuk peraturan di daerah, penyusunan Qanun agar melibatkan instansi pusat serta perancang peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Denda Emas, Hukuman Cambuk, Peraturan.

THE GOLD PENALTY AND FLOGGING IN THE ACEH QANUN

Sopiani

Abstract

The birth of the Aceh Qanun regarding the Law of Jinayat which regulates the criminal sanction of gold fines and caning is not based on the formulation and there are problems in the community. Law 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislative Regulations states that regional regulations / qanuns are in the form of a maximum imprisonment of 6 months or a maximum fine of Rp.50,000,000.00 and can regulate the threat of imprisonment or fines in accordance with statutory regulations. other invitations. This study aims to deepen and analyze the criminal penalties of gold and caning in the Aceh Qanun. The research method in this research is normative juridical legal research, carried out by examining theories, legal principles, norms, rules of legislation, and others. According to the author of the Aceh Qanun, the regulation of the amount and limits of criminal sanctions must be in accordance with the laws and regulations above.

Keywords : *Gold Fine, Flogging, Rules*